



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-5/PK/2025
DIREKTUR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan pertauran yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
DIREKTUR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel	1a-CP	Indeks integritas	100
		1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1c-N	Indeks Kepuasan Layanan Edukasi terkait PDRD	4.2
2	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat	2a-CP	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	6.1%
		2b-N	Tingkat Penguatan Local Taxing Power	90%
		2c-N	Rata-rata Waktu Penyelesaian Evaluasi Perda PDRD sesuai peraturan perundang-undangan	20
3	PDRD yang mendukung iklim dunia usaha	3a-N	Persentase Modernisasi Administrasi PDRD	18%
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas	4a-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	62%
		4b-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5
5	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	5a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100
6	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif, serta komunikasi publik yang efektif	6a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%
		6b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100
7	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	7a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

Kebijakan PDRD yang Terstandardisasi Rp449,785,000

Kegiatan

1. Kebijakan PDRD yang terstandardisasi Rp344,815,000

2. FGD Sinkronisasi Peraturan Terkait PDRD Rp104,970,000

Program:

Penguatan Implementasi Kebijakan PDRD Rp379,850,000

Kegiatan

1. Kepatuhan Implementasi Kebijakan PDRD Rp212,624,000

2. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pengelola Pendapatan Daerah Rp167,226,000

Program:

Rekomendasi Kebijakan PDRD (PN) Rp1,018,432,000

Kegiatan



1.	Pengembangan Potensi PDRD	Rp754,492,000
2.	Penyusunan Kajian Analisis terkait Rekomendasi Kebijakan dan Sinkronisasi PDRD	Rp263,940,000
Program:		
	Rekomendasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pajak Pusat dan Daerah	Rp184,064,000
Kegiatan		
1.	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pajak Pusat dan Daerah	Rp184,064,000

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Luky Alfirman

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Ditandatangani Secara Elektronik
Lydia Kurniawati Christyana



RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1c-N	Indeks Kepuasan Layanan Edukasi terkait PDRD	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
2	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat							
2a-CP	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	1.24%	2.77%	2.77%	4.51%	4.51%	6.1%	6.1%
2b-N	Tingkat Penguatan Local Taxing Power	10%	45%	45%	75%	75%	90%	90%
2c-N	Rata-rata Waktu Penyelesaian Evaluasi Perda PDRD sesuai peraturan perundang-undangan	20	20	20	20	20	20	20
3	PDRD yang mendukung iklim dunia usaha							
3a-N	Persentase Modernisasi Administrasi PDRD	5%	10%	10%	15%	15%	18%	18%
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas							
4a-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	25%	35%	35%	50%	50%	62%	62%
4b-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
5	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif							
5a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	80	80	80	80	80	100	100
6	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif, serta komunikasi publik yang efektif							
6a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
6b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
7	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
7a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%



Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Ditandatangani Secara Elektronik
Lydia Kurniawati Christyana



INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			
1	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat	Penyusunan Peta Potensi Pajak Daerah	1. a. Terwujudnya penetapan target penerimaan pajak daerah sesuai dengan potensi yang ada dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah	Januari - Desember	Kegiatan pengembangan kapasitas pengelolaan perpajakan daerah (bimtek, pelatihan, dll.) diprioritaskan bagi pemda yang telah berpartisipasi dalam PKS	Pemanfaatan data PKS secara optimal	Q1-Q4	1. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	0
			2. b. Terwujudnya optimalisasi penerimaan perpajakan daerah melalui pemanfaatan data perpajakan.	Januari - Desember	Permintaan data kepada instansi pengampu untuk penghitungan potensi pajak daerah melalui Wali Data DJPK dengan prosedur	Model Penghitungan Potensi Pajak Daerah, Peta Potensi Pajak Daerah			

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



					Perjanjian Kerja Sama (PKS) pertukaran data dan Sistem Layanan Data Kemenkeu (SLDK)				
2	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat	Kerangka Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah	1. a. Terwujudnya perbaikan proses pengadministrasian perpajakan daerah 2. b. Terwujudnya peningkatan penerimaan perpajakan daerah yang mendorong peningkatan local tax ratio 3. c. Terwujudnya peningkatan tax compliance.	Januari - Desember	Aplikasi Diagnostic Tools berbasis web dan terintegrasi dengan SIKD	Kegiatan Bimbingan Teknis Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah	Q1-Q4	1. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	0
				Januari - Desember	Pemanfaatan Aplikasi Diagnostic Tools Administrasi Perpajakan Daerah berbasis web sebagai assessment tools dalam modernisasi administrasi perpajakan daerah	Hasil assessment modernisasi administrasi perpajakan daerah, Rekomendasi/ Laporan Evaluasi atas Rencana Aksi Pemerintah Daerah terkait Upaya Modernisasi Perpajakan			



						Daerah			
				Januari - Desember	Perumusan regulasi yang mewajibkan pemerintah daerah menggunakan Aplikasi Diagnostic Tools	Regulasi pemanfaatan Aplikasi Diagnostic Tools berbasis web			
				Januari - Desember	Implementasi penggunaan Aplikasi Diagnostic Tools berbasis web sebagai kriteria penilaian Championship TP2DD	Pemuatan dalam kriteria penilaian Championship TP2DD			



Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Ditandatangani Secara Elektronik
Lydia Kurniawati Christyana



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Lydia Kurniawati Christyana		NAMA	Luky Alfirman
NIP	19680114 198802 2 001		NIP	19700327 199503 1 002
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
UNIT KERJA	Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
		Indeks Kepuasan Layanan Edukasi terkait PDRD	4.2	Penerima Layanan
2	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	6.1%	Penerima Layanan
		Tingkat Penguatan Local Taxing Power	90%	Penerima Layanan
		Rata-rata Waktu Penyelesaian Evaluasi Perda PDRD sesuai peraturan perundang-undangan	20	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



3	PDRD yang mendukung iklim dunia usaha	Persentase Modernisasi Administrasi PDRD	18%	Penerima Layanan
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas	Persentase perluasan basis penerimaan negara	62%	Proses Bisnis
		Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	Proses Bisnis
5	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100	Proses Bisnis
6	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif, serta komunikasi publik yang efektif	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas komunikasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA		
	- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA		
	- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik

Luky Alfirman

19700327 199503 1 002



Ditandatangani secara elektronik

Lydia Kurniawati Christyana

19680114 198802 2 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	68 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
	1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
	1c-N	Indeks Kepuasan Layanan Edukasi terkait PDRD	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
	2a-CP	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	1.24%	2.77%	2.77%	4.51%	4.51%	6.1%	6.1%
	2b-N	Tingkat Penguatan Local Taxing Power	10%	45%	45%	75%	75%	90%	90%
	2c-N	Rata-rata Waktu Penyelesaian Evaluasi Perda PDRD sesuai peraturan perundang-undangan	20	20	20	20	20	20	20
3a-N	Persentase Modernisasi Administrasi PDRD	5%	10%	10%	15%	15%	18%	18%	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



4a-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	25%	35%	35%	50%	50%	62%	62%
4b-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
5a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	80	80	80	80	80	100	100
6a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
6b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
7a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%
KONSEKUENSI								
Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.								

Jakarta, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Luky Alfirman

19700327 199503 1 002

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Lydia Kurniawati Christyana

19680114 198802 2 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025

